SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 101 TAHUN 2026

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar selaras dengan sasaran dan tujuan tugas pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran pelaksanaan anggaran, perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 74);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 132);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 39);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Agar Pengawasan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengoordinasikan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah Kabupaten serta Instansi terkait.

KETIGA : Pengawasan terbagi atas 7 (tujuh) bagian yaitu:
1. Audit Ketaatan
2. Audit Kinerja
3. Probity Audit
4. Audit dengan Tujuan Tertentu
5. Monitoring dan Evaluasi
6. Reviu
7. Kegiatan Pendukung Pengawasan

KEEMPAT : Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat bertanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan kepada Gubernur Sulawesi Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026, pada Pos Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 9 Februari 2026

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 101 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 Februari 2026
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
A	**KEGIATAN PEMERIKSAAN**						**87**	**LAPORAN**			
1	Audit Kinerja Tematik Mempercepat Pengentasan Kemiskinan	Audit Kinerja	Menilai kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E)	Pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri atas aspek Ekonomis, efisiensi dan efektivitas	Mg-I Mei 2026	Mg-III Mei 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I	Risiko
2	Audit Kinerja Tematik Mempercepat Pengentasan Kemiskinan	Audit Kinerja	Menilai kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, program atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E)	Pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang terdiri atas aspek Ekonomis, efisiensi dan efektivitas	Mg-I Mei 2026	Mg-III Mei 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II	Risiko
3	Audit Kinerja Tematik Mempercepat	Audit Kinerja	Menilai kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan	Pengelolaan keuangan dan	Mg-I Mei 2026	Mg-III Mei 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban III	Risiko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	Pengentasan Kemiskinan		efektivitas (3E)	pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang terdiri atas aspek Ekonomis, efisiensi dan efektivitas							
4	SEKRETARIAT DPRD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan	Aspek Keuangan, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Mg-III November 2026	Mg-IV November 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I	Risiko
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, serta Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Mg-IV Oktober 2026	Mg-I November 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I	Risiko
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN PERHUBUNGAN DAERAH	Audit Ketaatan	**Tujuan :** Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area,proses, sistem, fungsi, program/kegiatan **Sasaran :** Terpenuhinya infrastruktur pelayanan dasar dengan target kinerja persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, serta Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Mg-III Agustus 2026	Mg-IV Agustus 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I	Risiko
7	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Audit Ketaatan	**Tujuan :** Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan **Sasaran :** Meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas bahan pangan pertanian	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, serta Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Mg-II Juni 2026	Mg-III Juni 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I	Risiko
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN	Audit Ketaatan	**Tujuan :** Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan	1. Aspek kelembagaan	Mg-II Juni 2026	Mg-III Juni 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I	Risiko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		terkait yang telah ditetapkan atas area,proses, sistem, fungsi, program/kegiatan **Sasaran :** 1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan 3. Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosia	daerah terkait efektivitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). 2. Aspek kebijakan daerah terkait keandalan data 3. Aspek keuangan daerah, kebijakan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait perencanaan dan penganggaran daerah yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem							
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Audit Ketaatan	**Tujuan :** Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area,proses, sistem, fungsi, program/kegiatan **Sasaran :** Menguatnya penyelenggaraan tata kelola kependudukan	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, serta Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Mg-II Oktober 2026	Mg-III Oktober 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I	Risiko
10	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area,proses, sistem, fungsi, program/kegiatan	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, serta Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Mg-III Mei 2026	Mg-IV Mei 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II	Risiko
11	BADAN KEPEGAWAIAN	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi,	Mg-II Juli 2026	Mg-IV Juli 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II	Risiko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		ditetapkan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan	Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, serta Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.							
12	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area,proses, sistem, fungsi, program/kegiatan	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, serta Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Mg-II Juni 2026	Mg-III Juni 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II	Risiko
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Probity Audit	Memastikan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berjalan Transparan, Akuntabel, Jujur dan sesuai Aturan dengan Sasaran Mencegah Korupsi, Konflik dan Meningkatkan Integritas Publik	Probity Audit Mencakup Seluruh Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Memastikan Proses Jujur dan Benar Sesuai Ketentuan	Mg-III Mei, 2026	Mg-IV Mei, 2026	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II	Risiko
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Audit Ketaatan	**Tujuan :** Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area,proses, sistem, fungsi, program/kegiatan **Sasaran :** 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatnya ketahanan bencana dan iklim	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, serta Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Mg-I Mei 2026	Mg-II Mei 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II	Risiko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	Audit Ketaatan	**Tujuan :** Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area,proses, sistem, fungsi, program/kegiatan **Sasaran :** 1. Terwujudnya budaya literasi masyarakat 2. Meningkatnya mutu penyelenggaraan kearsipan dengan target jumlah organisasi perangkat daerah provinsi yang menerapkan e-Arsip terintegrasi	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, serta Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Mg-I Februari 2026	Mg-II Februari 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II	Risiko
16	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area,proses, sistem, fungsi, program/kegiatan	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, serta Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Mg-I April 2026	Mg-II April 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II	Risiko
17	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Audit Ketaatan	**Tujuan :** Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area,proses, sistem, fungsi, program/kegiatan **Sasaran :** Terlaksananya pembangunan energi dan ketenagalistrikan dalam mendukung transisi energi .	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, serta Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Mg-II Juni 2026	Mg-II Juni 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II	Risiko
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	Audit Ketaatan	**Tujuan :** Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area,proses, sistem, fungsi, program/kegiatan **Sasaran :** Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, serta Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Mg-II Juni 2026	Mg-IV Juni 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban III	Risiko
19	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Audit Ketaatan	**Tujuan :** Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area,proses, sistem, fungsi, program/kegiatan	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber	Mg-I Juli 2026	Mg-III Juli 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban III	Risiko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
			Sasaran : Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi dan Penyerapan Tenaga Kerja	Daya Manusia, serta Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.							
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAERAH	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area,proses, sistem, fungsi, program/kegiatan	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, serta Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Mg-II September 2026	Mg-IV September 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban III	Risiko
21	DINAS PERKEBUNAN	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area,proses, sistem, fungsi, program/kegiatan	Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, serta Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Mg-I Juni 2026	Mg-II Juni 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban III	Risiko
22	BIRO UMUM	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area,proses, sistem, fungsi, program/kegiatan	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, serta Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Mg-III Januari 2026	Mg-IV Januari 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban III	Risiko
23	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area,proses, sistem, fungsi, program/kegiatan	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, serta Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Mg-II Maret 2026	Mg-III Maret 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban III	Risiko
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Probity Audit	**Tujuan :** Untuk meyakinkan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa	Probity Audit terhadap Pelaksanaan	Mg- Jan s/d Des 2026	Mg- Jan s/d Des 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II	Risiko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
			Sasaran : Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	Barang dan Jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis							
25	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Probity Audit	**Tujuan :** Untuk meyakinkan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa **Sasaran :** Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	Probity Audit terhadap Pelaksanaan Barang dan Jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	Mg- Jan s/d Des 2026	Mg- Jan s/d Des 2026	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I	Risiko
26	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan Khusus	**Tujuan :** Memberikan atensi atas laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pimpinan. **Sasaran :** 1. Penanganan Pengaduan masyarakat 2. Melaksanakan pengawasan atas permintaan dari pimpinan; 3. Melaksanakan pengawasan atas permintaan APH.	Seluruh OPD	Jan - Des 2026	Jan - Des 2026	62 LHP	Laptop, ATK		Sekretariat, Irban I, II, III, dan Irban khusus	Mandatory
B	**KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI**						**262**	**LAPORAN**			
1	Monitoring Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Monitoring	Monitoring terhadap penyediaan makanan sehat dan bergizi kepada pelajar secara rutin di seluruh Provinsi Sulawesi Barat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mg-II,III,IV Februari 2026	Mg-II,III,IV Maret 2026	21 LHM	Laptop, ATK		Irban III	Stranas
2	Monitoring Pengawasan Terkait Penggunaan Dana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Monitoring	Monitoring Pelaksanaan Revitalisasi dan penguatan koperasi lokal guna mendorong ekonomis desa dan kelurahan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mg-II,III,IV Februari 2026	Mg-II,III,IV Maret 2026	21 LHM	Laptop, ATK		Irban I	Stranas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
3	Monitoring dan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan	Monitoring	**Tujuan :** Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan atas area,proses, sistem, fungsi, program/kegiatan **Sasaran :** Menurunnya tingkat kemiskinan ekstrim	Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten se Prov. Sulbar	Mg-I Mei 2026	Mg-IV Mei 2026	6 LHM	Laptop, ATK		Irban I, II dan III	
4	Monitoring Pernikahan Anak di Bawah Umur	Monitoring	**Tujuan :** untuk memastikan rangkaian kegiatan pelaksanaan Penurunkan angka pernikahan anak di bawah umur melalui pengumpulan data yang akurat, evaluasi kebijakan, serta penguatan upaya pencegahan dan perlindungan hak anak **Sasaran :** Menurunnya tingkat pernikahan anak di bawah umur	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mg-III Juni 2026	Mg-IV Juni 2026	6 LHM	Laptop, ATK		Irban I	Mandatory
5	Monitoring dan Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Monitoring	**Tujuan :** Memberikan Keyakinan memadai Bagi Tercapainya Efektifitas dan efisiensi Pencapaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Keandalan Laporan Keuangan dan Pengamanan Aset daerah dan Ketaatan Terhadap Peraturan **Sasaran:** Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Seluruh OPD	Jan - Des 2026	Des 2026	29 LHM	Laptop, ATK		Irban Khusus	Mandatory
6	Monitoring Center of Prevention (MCP)	Monitoring	**Tujuan :** Memastikan pemenuhan ketersediaan data/dokumen terkait MCP KPK RI. **Sasaran :** Untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah.	OPD pengampu MCP Provinsi Sulawesi Barat	Mg-IV Februari, IV Maret 2026	Mg-I April 2026	4 LHE	Laptop, ATK		Irban Khusus	Mandatory
7	Survei Penegakan Integritas (SPI)	Monitoring	**Tujuan :** Untuk menilai Indeks Integritas Pemerintah Daerah **Sasaran :** Responden Internal (Pegawai/ASN), Exsternal (Pengguna layanan publik) dan ekspert (Ahli)	Inspektorat Prov. Sulbar	Jan - Des 2026	Jan - Des 2026	3 Dokumen	Laptop, ATK		Irban Khusus	
8	Monitoring Gratifikasi	Monitoring	**Tujuan :** Membangun Integritas dan Menciptakana Lingkungan yang	Seluruh OPD	Jan - Des 2026	Jan - Des 2026	1 LHM	Laptop, ATK		Irban Khusus	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
			Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat **Sasaran :** Penyelenggara Pemerintahan								
9	Percontohan Perluasan Desa Antikorupsi	Monitoring	**Tujuan :** Untuk melakukan pengenalan/verifikasi dan valisasi terhadap desa yang memenuhi kriteria desa Anti Korupsi. **Sasaran :** Desa - Desa di 6 (enam) Kabupaten se - Provinsi Sulawesi Barat yang akan di ajukan Pemerintah Kabupaten untuk mengikuti nominasi sebagai calon desa anti korupsi.	Inspektorat Prov. Sulbar	Jan - Des 2026	Jan - Des 2026	6 Dokumen	Laptop, ATK		Irban Khusus	
10	Monitoring Inflasi Daerah	Monitoring	**Tujuan :** untuk memastikan rangkaian kegiatan pelaksanaan pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku **Sasaran :** Kegiatan Pengendalian Inflasi Daeah Se- Provinsi Sulawesi Barat (6 Kabupaten + 9 OPD Pengampu)	Inspektorat Prov. Sulbar	Jan - Des 2026	Jan - Des 2026	12 Dokumen	Laptop, ATK		Irban Khusus	
11	Monitoring Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, ITJEN KEMENDAGRI, BPKP dan Inspektorat	Monitoring	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Seluruh OPD	Jan - Des 2026	Jan - Des 2026	58 LHM	Laptop, ATK		Sekretariat	Mandatory
12	Monitoring LHKPN / LHKASN	Monitoring	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN	Seluruh Pejabat dan Seluruh ASN	Mg-I Januari 2026	Mg-IV Maret 2026	1 LHM	Laptop, ATK		Sekretariat	Mandatory
13	Monitoring Padat Karya	Monitoring	**Tujuan :** Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Keandalan dan Keabsahan Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan capaian Output Kegiatan Dak Fisik Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku **Sasaran :** Penyerapan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Mg-IV Agustus 2026	Mg-II Agustus 2026	1 LHM	Laptop, ATK		Irban III	Mandatory
14	Monitoring Penanganan Stunting	Monitoring	Memastikan Pelaksanaan Program Penanganan Stunting, ningkatkan kualitas hidup anak, menurunkan prevalensi stunting	Dinas Kesehatan, Pengendalian	Mg-I Agustus	Mg-II Agustus	1 LHM	Laptop, ATK		Irban II	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
			dan meningkatkan produktifitas nasional	Penduduk dan Keluarga Berencana	2026	2026					
15	Pelayanan Publik	Monitoring	**Tujuan :** Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat **Sasaran :** Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Sesuai denga Aturan Maladministrasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMPTSP dan Rumah Sakit Daerah	Mg-I Agust 2026	Mg-II Agust 2026	4 LHM	Laptop, ATK		Irban III	Mandatory
16	Evaluasi Manajemen Risiko OPD (34 OPD)	Evaluasi	**Tujuan :** Memperoleh Informasi Tentang Implementasi, Menilai Tingkat Implementasi, Memberikan saran Perbaikan untuk Peningkatan implementasi dan Memonitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya **Sasaran :** Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas	Seluruh OPD	Mg-IV Februari 2026	Mg-I Maret 2026	34 Dokumen	Laptop, ATK		Irban Khusus dan Sekretariat	Mandatory
17	Evaluasi SAKIP OPD (34 OPD)	Evaluasi	**Tujuan :** Memperoleh Informasi Tentang Implementasi, Menilai Tingkat Implementasi, Memberikan saran Perbaikan untuk Peningkatan implementasi dan Memonitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya **Sasaran :** Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas	Seluruh OPD	Mg-I,IV April 2026	Mg-I Mei 2026	34 LHE	Laptop, ATK		Irban I, II dan III	Mandatory
18	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi (RB)	Evaluasi	**Tujuan :** Menilai dan mengevaluasi Proses Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **Sasaran :** 1. Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi 2. Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi	Seluruh OPD	Mg-I Maret, Juni, Sep dan Des 2026	Mg-IV Maret, Juni, Sep dan Des 2026	2 LHE	Laptop, ATK		Irban I, III	Mandatory
19	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Evaluasi	**Tujuan :** Mengumpulkan dan menganalisis Data Secara Sistematis Terhadapa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah **Sasaran :**	Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi	Mg-IV Februari, IV Maret 2026	Mg-I April 2026	7 LHE	Laptop, ATK		Irban II	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
			Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Memadai dan Berkualitas								
20	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Evaluasi	**Tujuan :** Mengetahui Pelaksanaan PPRG mulai dari Tahap Persiapan, Pelaksanaan Keluaran dan Hasil yang Dicapai Serta Hambatan yang dihadapi **Sasaran :** Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mg-II Agustus 2026	Mg-IV Agustus 2026	1 LHE	Laptop, ATK		Irban I	Mandatory
21	Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas (ZI)	Evaluasi	**Tujuan :** Menilai dan mengevaluasi Proses Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK **Sasaran :** 1. Capaian nilai pelaksanaan Zona Integritas 2. Optimalisasi pembangunan Zona Integritas	OPD pengampuh Zona Integritas Provinsi Sulawesi Barat dan Internal	Mg-I April 2026	Mg-IV April 2026	4 LHE	Laptop, ATK		Irban III	Mandatory
22	Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Evaluasi	**Tujuan :** Menilai pencapaian dan kualitas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Sasaran : Terciptanya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berkualitas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mg-IV Februari, IV Maret 2026	Mg-I April 2026	1 LHE	Laptop, ATK		Irban II	Mandatory
23	Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE	Evaluasi	**Tujuan :** Memastikan pemenuhan ketersediaan data/dokumen terkait Pelaksanaan SPBE. **Sasaran :** Mewujudkan kinerja pemerintah berbasis elektronik.	OPD pengampu SPBE Provinsi Sulawesi Barat dan Internal	Mg-IV Februari, IV Maret 2026	Mg-I April 2026	1 LHE	Laptop, ATK		Sekretariat	Mandatory
24	Telaahan Sejawat	Evaluasi	**Tujuan :** Menilai Efisisensi dan efektifitas Organisasi APIP sesuai dengan Visi Misi Tugas dan Fungsinya dan Harapan Pimpinan Tertinggi Organisasi **Sasaran :** Menilai kesesuaian hasil pemeriksaan dengan aturan yang berlaku	Internal dan Eksternal	Mg-I Januari 2026	Mg-I Februari 2026	4 LHE	Laptop, ATK		Irban I, II dan III, Sekretariat	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
C	**KEGIATAN REVIU**						**230**	**LAPORAN**			
1	Reviu LKPD Pemprov. Sulbar	Reviu	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintah	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modefikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.	Mg-III Februari 2026	Mg-III Maret 2026	1 LHR	Laptop, ATK		Irban I	Mandatory
2	Reviu LPPD Pemprov	Reviu	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Pemerintah Provinsi	Mg-IV Februari s.d IV Maret, Mg-II s.d III Juli 2026	Mg-IV April, III Agustus 2026	1 LHR	Laptop, ATK		Irban II	Mandatory
3	Reviu RKPD Pokok	Reviu	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah;	Mg-II Mei 2026	Mg-III Juni 2026	34 LHR	Laptop, ATK		Irban I	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
				2. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; 3. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah							
4	Reviu RKPD Perubahan	Reviu	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; 2. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; 3. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja	Mg-III Juni 2026	Mg-III Juli 2026	34 LHR	Laptop, ATK		Irban I	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
				pemerintah daerah							
5	Reviu Renja OPD Pokok	Reviu	Meningkatnya Rencana Kerja Pokok Daerah (Renja PD).	1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah. 2. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. 3. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.	Mg-IV April 2026	Mg-IV Mei 2026	34 LHR	Laptop, ATK		Irban I, II dan III	Mandatory
6	Reviu Renja OPD Perubahan	Reviu	Meningkatnya Rencana Kerja Perubahan Daerah (Renja PD).	1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah. 2. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. 3. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan	Mg-II Agustus 2026	Mg-I September 2026	34 LHR	Laptop, ATK		Irban I, II dan III	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
				dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.							
7	Reviu KUA - PPAS Pokok	Reviu	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	1. Pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 2. Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara, meliputi: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah.	Mg-IV Mei 2026	Mg-III Juni 2026	1 LHR	Laptop, ATK		Irban II	Mandatory
8	Reviu KUA - PPAS Perubahan	Reviu	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	1. Pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.	Mg-IVJuli 2026	Mg-III Agustus 2026	1 LHR	Laptop, ATK		Irban II	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
				2. Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara, meliputi: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah.							
9	Reviu RKA OPD TA. 2026	Reviu	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	1. Pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 2. Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah, dengan	Mg-II Agustus 2026	Mg-IV September 2026	34 LHR	Laptop, ATK		Irban I, II dan III	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
				indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.							
10	Reviu Perubahan RKA OPD TA. 2026	Reviu	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	1. Pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 2. Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.	Mg-I September 2026	Mg-III September 2026	34 LHR	Laptop, ATK		Irban I, II dan III	Mandatory
1	Reviu Standar Satuan	Reviu	Memberi keyakinan bahwa harga satuan barang jasa masih dalam	SSH Barang dan	Mg-I s.d IV	Mg-IV Juli	1 LHR	Laptop,		Irban II	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Harga (SSH) dan Analisis Satuan Belanja (ASB)		batas kewajaran sesuai dengan ketentuan	Jasa	Juni 2026	2026		ATK			
1 2	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Reviu	Menilai Kesesuaian Tingkat Penyerapan anggaran dan Belanja daerah sesuai dengan aturan yang berlaku	Seluruh OPD	Mg-IV Maret, Mg-IV Juni, Mg-IV Sep, Minggu IV Des 2026	Mg III Apr, Mg III Juli, Minggu III Oktober, Minggu III Des 2026	1 LHR	Laptop, ATK		Irban Khusus	Mandatory
1 3	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)	Reviu	**Tujuan :** Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Keandalan dan Keabsahan Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan capaian Output Kegiatan Dak Fisik Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku **Sasaran :** Penyaluran dana DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jan - Des 2026	Jan - Des 2026	1 LHR	Laptop, ATK		Irban II dan III	Mandatory
1 4	Reviu Hibah	Reviu	**Tujuan :** Memberikan keyakinan terbatas terhadap proses penyaluran dana hibah daerah **Sasaran :** Penyaluran dana hibah daerah	OPD Penerima Dana Hibah	Mg-III Sep 2026	Mg-III Okt 2026	5 LHR	Laptop, ATK		Irban II dan III	Mandatory
1 5	Reviu Tata Kelola Kepatuhan BMD	Reviu	**Tujuan :** Memberikan Keyakinan Terbatas Pengelolaan Barang Milik daerah Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undaangan **Sasaran :** Aset Pemerintah Provinsi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Mg-I Okt 2026	Mg II Nov 2026	1 LHR	Laptop, ATK		Irban II	Mandatory
1 6	Reviu Perjalanan Dinas dan Honorarium	Reviu	**Tujuan :** Memberikan Keyakinan Terbatas Tata Kelola Penerimaan Pajak dan Retriubusi Daerah Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undaangan **Sasaran :** Pajak dan Retribusi Pemerintah Provinsi	Biro Umum dan Sekretariat DPRD	Mg-II Nov 2026	Mg II Des 2026	1 LHR	Laptop, ATK		Irban I, III	Mandatory
1 7	Reviu Tata Kelola Penerimaan Pajak dan Retriubusi Daerah	Reviu	**Tujuan :** Memberikan Keyakinan Terbatas Tata Kelola Penerimaan Pajak dan Retriubusi Daerah Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undaangan **Sasaran :**	Badan Pendapatan Daerah	Mg-II Februari 2026	Mg-IV Februari 2026	1 LHR	Laptop, ATK		Irban III	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
			Pajak dan Retribusi Pemerintah Provinsi								
18	Reviu Managemen Kepegawaian	Reviu	**Tujuan :** Memastikan Mutasi, Rotasi dan Promosi Pegawai Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku dan Tidak Ada Jual Beli Jabatan **Sasaran :** ASN, Pejabat Struktural	Badan Kepegawaian daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia	Mg-I Juli 2026	Mg-IV Juli 2026	1 LHR	Laptop, ATK		Irban II	Mandatory
19	Reviu Tata Kelola Perizinan	Reviu	**Tujuan :** Meningkatkan kualitas tata kelola perizinan agar terselenggara secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance, **Sasaran :** Terciptanya Tata Kelola Perizinan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mg-I Juli 2026	Mg-IV Juli 2026	1 LHR	Laptop, ATK		Irban II	Mandatory
20	Reviu Tata Kelola Barang dan Jasa	Reviu	**Tujuan :** Memberikan Keyakinan Terbatas Bahwa suatu Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Telah dilaksanakan Sesuai Ketentuan, Standar, Rencaana atau Norma yang Telah Ditentukan **Sasaran :** Pengelolaan Barang dan Jasa	Biro Pengadan Barang dan Jasa	Mg-I Okt 2026	Mg-IV Okt 2026	1 LHR	Laptop, ATK		Irban Khusus	Mandatory
21	Pelayanan Publik	Reviu	**Tujuan :** Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat **Sasaran :** Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Sesuai denga Aturan	DPMPTSP dan Rumah Sakit Daerah	Jan - Des 2026	Jan - Des 2026	2 LHR	Laptop, ATK		Irban II	Mandatory
D	**KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN**						**4 LAPORAN**				
1	Kapabilitas APIP Provinsi	Pendukung	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: 1. Kualitas Peran dan Layanan	Jan - Des 2026	Jan - Des 2026	1 LH Penilaian Mandiri	Laptop, ATK		Sekretariat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
				2. Praktik profesional 3. Manajemen Pengawasan APIP 4. Pengelolaan sumber daya manusia 5. Budaya dan hubungan organisasi							
2	Penyusunan Peta Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) Tahun 2027	Pendukung	Terciptanya Program kerja pengawasan yang terorganisir dan berbasis risiko	Inspektorat Prov. Sulbar	Mg-I Nov 2026	Mg- I Des 2026	1 Dokumen	Laptop, ATK		Sekretariat	
3	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (RAKORWASNAS)	Pendukung	Terciptanya Program kerja pengawasan yang tersinkronisasi	Kebijakan Pengawasan Nasional	Mg-III Nov 2026	Mg-III Nov 2026	1 Laporan Kegiatan	Laptop, ATK		Sekretariat	
4	Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA)	Pendukung	Terciptanya Program kerja pengawasan yang tersinkronisasi	Kebijakan Pengawasan Daerah	Mg-III Februari 2026	Mg-III Februari 2026	1 Laporan Kegiatan	Laptop, ATK		Sekretariat	
	T O T A L						**583**	**LAPORAN**			

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).